

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Anggaran Pendidikan Harus Ditangani Secara Tepat
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia/ Hal. 4
Edisi	: Selasa, 8 April 2018

## Anggaran Pendidikan Harus Ditangani Secara Tepat

**WASTUKENCANA, (GM),-**

*Perumusan Peraturan Pelaksanaan Pendidikan sebagai tindaklanjut Perda Kota Bandung No. 2/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mencakup keseluruhan elemen penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung. Pasalnya, hal itu akan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan.*

Terlebih Perda tersebut, merupakan perwujudan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di tingkat kota.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, pengalokasian anggaran penyelenggaraan pendidikan harus diberikan dan ditangani oleh sumber daya yang tepat.

"Semangat Perda ini begitu besar untuk mendorong kemajuan di Kota Bandung. Karena dari perencanaannya, pengalokasian anggarannya, pelaksanaannya, sampai ke tenaga pendidiknya juga diperhatikan, bahkan termasuk yang selain ASN juga diatur di dalam Perda ini," jelasnya pada Publikasi dan Sosialisasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan di Auditorium Balai Kota Bandung, Jln. Wastukencana, Kamis (3/5) lalu.

Menurutnya, untuk perancangan peraturan pelaksanaan ini, masih ada waktu kurang lebih setahun sebelum disahkan. Selain dari sisi penganggaran juga dari sisi pengelolaan. Sehingga diharapkan jangan sampai pihak terkait tidak siap mendapat alokasi yang besar.

"Sejak Perda dikeluarkan pada 23 Maret 2018, ada waktu sekitar setahun untuk dibuatkan peraturan pelaksanaannya," katanya.

Oleh karena itu, Dadang meminta Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum peraturan ini segera merancang mulai dari sekarang.

"Harus dari sekarang, oleh karena itu perlu dorongan dari Disdik dan

dibantu oleh Bagian Hukum yang memang sudah ahlinya untuk merumuskan peraturan ini," ujarnya.

Bermutu

Pada kesempatan yang sama, Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan, Bambang Harianto menuturkan keluarnya perda tersebut, akan menjadi perbaikan dari sekaligus menyempurnakan perda yang terdahulu. Sehingga berbagai kekurangan pada perda sebelumnya dapat diisi oleh perda ini.

Selain itu, melalui perda tersebut dapat menyajikan pendidikan yang bermutu, termasuk bagi yang memiliki kesulitan ekonomi. Ditambah menjamin tenaga pendidikan yang berpotensi dan mumpuni.

"Jadi Pemerintah Kota Bandung mampu menciptakan sekolah-sekolah dengan sarana prasarana yang ramah dan sesuai dengan jiwa anak. Termasuk menganggarkan biaya pendidikan," ucapnya.

Dikatakannya dalam perda tersebut, Pemkot Bandung menyediakan 20 persen anggaran pendidikan di luar belanja tidak langsung, yang dipenuhi secara bertahap. Diharapkan dengan meningkatnya anggaran

itu, akan melahirkan pendidikan Kota Bandung yang berkualitas.

"Selanjutnya bagaimana pemerintah Kota Bandung memfasilitasi pola kemitraan dan kerjasama, baik dari lembaga-lembaga di luar Kota Bandung atau luar negeri. Dalam rangka menaikkan mutu pendidikan Kota Bandung," terangnya.

Wakil Komisi D DPRD Kota Bandung, Endrizal Nazar berharap pemimpin Kota Bandung pada lima tahun yang akan datang dapat memenuhi angka 20 persen anggaran tersebut, karena tantangannya berada diluar belanja daerah.

Diakuinya terdapat berbagai strategi yang perlu disiapkan pemerintah dalam mencapai hal tersebut. Mulai dari peningkatan pendapatan dan aset daerah, sampai efisiensi berbagai program yang dinilai tidak terlalu efektif.

"Dalam pemenuhan hal tersebut, juga dapat melalui perubahan dari sektor-sektor yang sebelum manual diubah menjadi pola online. Sehingga dapat terus memaksimalkan potensi-potensinya," tambahnya.

(rio)\*\*